



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK.2-27.KP.03.04 TAHUN 2021

TENTANG

PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Komputer di lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
- b. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Nomor B-1601/BPS/2340/11/2020 tanggal 30 November 2020, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat dan direkomendasikan dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer melalui mekanisme penyesuaian/*inpassing*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyesuaian/*Inpassing* Dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
5. Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 002/BPS-SKB/II/2004 dan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer Melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN : ...

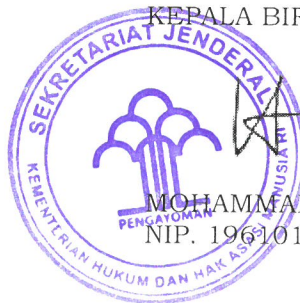
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, disesuaikan/*inpassing* dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2021



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



MOHAMMAD HAYAT HENRI
NIP. 196101291985031001

Tembusan :

1. Kepala Badan Pusat Statistik;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;;
6. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
10. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

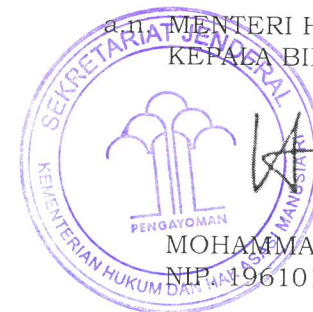
DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK.2-27.KP.03.04 TAHUN 2021

TANGGAL : 28 Januari 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.	MUHAMMAD HEINDARDI YUANSYAH, S.Kom. NIP. 198512062010121001	Penata (III/c)	Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pranata Komputer Muda pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	214.000
2.	PUJI ANDREANTO, S.Kom. NIP. 198506252015031003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pranata Komputer Pertama pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	154.000
3.	ARI FACHRYADI, S.Kom. NIP. 198611052015031003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pranata Komputer Pertama pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	154.000
4.	NURALIA, S.Kom., M.Kom. NIP. 198504242009122008	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pranata Komputer Pertama pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	168.000
5.	GANIS KHUFAD ARRIDHO, S.Kom. NIP. 199004232015031003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pranata Komputer Pertama pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	154.000
6.	ISMOYO PAMUNGKAS, S.Kom. NIP. 199007122015031002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pranata Komputer Pertama pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	154.000
7.	MUH. SETIAWAN, S.Kom. NIP. 199006112015031003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pranata Komputer Pertama pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	154.000
8.	ZULIAN VERRY SAPUTRA, S.Kom. NIP. 198707192015031002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pranata Komputer Pertama pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	154.000
					9. ...

1	2	3	4	5	6
9.	SAUR PANGIHUTAN SINURAT, S.Kom NIP. 199005232015031002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pranata Komputer Pertama pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	154.000
10.	SAPRUDIN, S.Kom. NIP. 198708272015031003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pranata Komputer Pertama pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	154.000
11.	ANGGUN SATRIO WIBOWO, A.Md. NIP. 198007252010121002	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta	Pranata Komputer Mahir pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta	112.000



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

MOHAMMAD HAYAT HENRI
NIP. 196101291985031001